**EFEKTIVITAS MODEL KEMITRAAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT**

**DALAM LAYANAN PUBLIK**

**Mahar Muharram Hamzah Assabrun Malik1\*, Sukmawati2, Adi Hermawan3**

Universitas Andi Sudirman, Makassar, Sulawesi Selatan1

Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Papua Pegunungan2

STIKes Amanah Makassar, Sulawesi Selatan3

\*E-mail: maharmuharramham@gmail.com

sukmawati22031997@gmail.com

adyhermawan27@gmail.com

# ABSTRACT

*The success of this project can be seen from the increased efficiency and transparency of public services, as well as the increasing sense of public trust in the government. In this case, collaboration between various public sectors and the community creates efficiency in the use of resources and makes it easier for the public to access public services that were previously separate. This study uses a qualitative literature review approach to examine the effectiveness of the Collaborative Governance model in public services in Indonesia. The literature review method was chosen because it provides a comprehensive and in-depth picture of a topic that has been widely studied before and provides a strong theoretical basis for interpreting the phenomenon being studied. This process collects, assesses, and analyzes various previous studies that are relevant to the research theme, in order to build a more comprehensive understanding of the application of Collaborative Governance in managing public services. The steps in the Literature Review Method are to find the determination of the main findings criteria from the existing literature review, the challenges faced, and the latest expert opinions that are relevant in this context. Application of Collaborative Governance in Public Services The Collaborative Governance model in managing public services has been widely applied in various countries, including Indonesia. Partnerships between the government and the community in the provision of public services are one of the approaches that are increasingly developing in efforts to improve the quality of public services in various sectors. This partnership model aims to optimize Based on the conclusions that have been presented, here are some suggestions to increase the effectiveness of the government and community partnership model in public services.*

***Keywords:*** *Effectiveness, Partnership Model, Government and Public Services*

# ABSTRAK

Keberhasilan proyek ini dapat dilihat dari meningkatnya efisiensi dan transparansi pelayanan publik, serta meningkatnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam hal ini, kolaborasi antara berbagai sektor publik dan masyarakat menciptakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik yang sebelumnya terpisah-pisah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif literature review untuk mengkaji efektivitas model collaborative governance dalam layanan publik di Indonesia. Metode literature review dipilih karena memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai topik yang telah banyak diteliti sebelumnya serta memberikan dasar teori yang kuat untuk menginterpretasikan fenomena yang sedang dikaji. Proses ini mengumpulkan, menilai, dan menganalisis berbagai studi terdahulu yang relevan dengan tema penelitian, guna membangun pemahaman yang lebih menyeluruh tentang penerapan collaborative governance dalam pengelolaan layanan publik. Adapun Langkah- Langkah dalam Metode Literatur Review adalah mencari penentuan kriteria Temuan utama dari kajian literatur yang ada, tantangan yang dihadapi, serta pandangan ahli terbaru yang relevan dalam konteks ini. Penerapan Collaborative Governance dalam Layanan Publik Model collaborative governance dalam pengelolaan layanan publik telah banyak diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik merupakan salah satu pendekatan yang semakin berkembang dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor. Model kemitraan ini bertujuan untuk mengoptimalkan Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, berikut beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas model kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam layanan publik

**Kata Kunci**: Efektivitas, Model Kemitraan, Pemerintah dan Pelayanan Publik

# PENDAHULUAN

# Penyelenggaraan layanan publik yang efisien dan efektif menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pemerintahan modern, khususnya di Indonesia. Dalam menghadapi berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik yang semakin kompleks, pendekatan konvensional yang hanya melibatkan pemerintah tidak lagi memadai. Salah satu solusi yang mulai diterapkan adalah melalui model kemitraan antara pemerintah dan masyarakat yang dikenal dengan istilah *collaborative governance* atau tata kelola kolaboratif. Model ini melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk sektor publik, swasta, masyarakat sipil, dan akademisi, dalam merancang dan melaksanakan kebijakan serta program layanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Model *collaborative governance* pertama kali diperkenalkan oleh beberapa pakar seperti (Ansell & Gash, 2008) yang mendefinisikan konsep ini sebagai suatu proses pengambilan keputusan bersama yang melibatkan berbagai aktor dari sektor publik dan non-publik. (Yuliani & Humsona, 2021) bahwa model kemitraan yang efektif harus menghargai hak-hak dasar manusia. Pendekatan ini menekankan pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Contoh penerapannya dapat dilihat pada pembangunan Kota Layak Anak di Surakarta dan pengembangan ekowisata berbasis komunitas di Gedong-Pass, Kabupaten Semarang. juga mengemukakan Menurut mereka, tata kelola kolaboratif adalah bentuk pengaturan pemerintahan yang tidak hanya mengandalkan keputusan otoritatif dari pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. (Emerson et al., 2012) lebih lanjut menyatakan bahwa *collaborative governance* bertujuan untuk mengatasi tantangan kebijakan publik yang kompleks dengan cara memanfaatkan pengetahuan dan sumber daya yang ada di berbagai sektor. Proses ini, menurut Emerson, melibatkan mekanisme deliberatif dan konsensus dalam pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak.

# Teori Collaborative Governance menurut Emerson dkk. yang diadaptasi oleh peneliti Indonesia menekankan keterlibatan multipihak (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam perencanaan dan pelaksanaan layanan publik, dengan nilai kolaboratif seperti kepercayaan, komitmen bersama, dan inovasi bersama (Utami et al., 2023) Collaborative governance merupakan suatu model pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik, yang tidak hanya bergantung pada keputusan pemerintah saja. Model ini pertama kali dikemukakan oleh (Ansell & Gash, 2008), yang mengidentifikasi tata kelola kolaboratif sebagai suatu bentuk tata pemerintahan yang melibatkan berbagai aktor untuk mencapai keputusan bersama. Menurut mereka, keberhasilan kolaborasi ini bergantung pada konsensus dan partisipasi aktif dari pihak-pihak yang terlibat, serta kesepahaman mengenai tujuan bersama yang akan dicapai.

# (Emerson et al., 2012) menjelaskan bahwa kolaborasi antara sektor publik dan non-publik dalam tata kelola kolaboratif bertujuan untuk memecahkan masalah yang kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja. Model ini menuntut adanya komunikasi yang terbuka, deliberasi yang transparan, serta mekanisme pengambilan keputusan yang berbasis konsensus di antara berbagai aktor yang terlibat. Model ini bukan hanya sekadar kolaborasi antar instansi pemerintah, tetapi juga mengajak sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi untuk berperan aktif. Dalam konteks pengelolaan layanan publik, *collaborative governance* dianggap mampu mengatasi masalah kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah yang berperan sebagai fasilitator dapat membantu menciptakan mekanisme bagi para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan serta sumber daya, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan (Ansell & Gash, 2008).

# Implementasi *collaborative governance* di Indonesia mulai dirasakan dampaknya dalam berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lingkungan hidup. Salah satu contoh penerapan model ini yang cukup mencolok adalah penanggulangan pandemi COVID-19, di mana kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dapat mempercepat distribusi vaksin dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, misalnya, kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC) berhasil membentuk posko dukungan yang menangani berbagai aspek terkait penanggulangan COVID-19. Kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada pembentukan posko, tetapi juga mencakup tiga fungsi utama: cipta kondisi, dekontaminasi, dan pemulasaran jenazah COVID-19. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa model kolaboratif dapat mempercepat respons terhadap permasalahan yang kompleks dan mendesak dengan melibatkan berbagai pihak (Perdana et al., 2021). Selain itu, program Public Service Mall (MPP) yang diterapkan di beberapa kota besar seperti Surabaya dan Jakarta juga menjadi contoh sukses dari penerapan *collaborative governance*. Dalam proyek MPP, berbagai instansi pemerintah berkumpul dalam satu tempat untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara langsung. Di Surabaya, misalnya, terdapat 23 instansi pemerintah yang terlibat dalam MPP, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan publik dalam satu lokasi. Keberhasilan proyek ini dapat dilihat dari meningkatnya efisiensi dan transparansi pelayanan publik, serta meningkatnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam hal ini, kolaborasi antara berbagai sektor publik dan masyarakat menciptakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik yang sebelumnya terpisah-pisah (Kurniawan et al., 2020).

# Meskipun penerapan *collaborative governance* di Indonesia menunjukkan hasil yang menggembirakan, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya masih cukup besar. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam membangun kemitraan yang kuat dengan masyarakat dan sektor swasta. Di Kabupaten Barru, misalnya, meskipun ada upaya untuk membentuk forum komunikasi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melibatkan berbagai pihak, partisipasi dari pemerintah daerah dalam pertemuan forum ini sangat terbatas. Hal ini menghambat efektivitas pengelolaan DAS Cidanau yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat, LSM, akademisi, dan media. Kurangnya komitmen dan partisipasi aktif dari pihak-pihak yang terlibat berpotensi menurunkan kualitas pengelolaan dan penyelesaian masalah yang ada (Lubis et al., 2021).

# Tantangan lainnya terletak pada perbedaan kepentingan antara berbagai aktor yang terlibat dalam proses *collaborative governance*. Tidak jarang, terdapat ketidaksesuaian antara tujuan pemerintah dan masyarakat, atau antara sektor swasta dengan sektor publik. Oleh karena itu, membangun komunikasi yang efektif dan kesepahaman antar pihak yang terlibat menjadi hal yang sangat penting. Tantangan dalam koordinasi antar aktor ini juga muncul dalam pengelolaan layanan publik di Kota Makassar, di mana meskipun terdapat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan pandemi COVID-19, namun koordinasi yang kurang optimal antara sektor-sektor yang terlibat menyebabkan proses penanganan tidak sepenuhnya efektif (Alim, 2021). Di samping tantangan-tantangan tersebut, *collaborative governance* juga menghadapi masalah teknis terkait dengan implementasi dan pengawasan. Tidak semua daerah memiliki kapasitas administratif dan teknologi yang memadai untuk mendukung kolaborasi antar sektor dengan baik. Terlebih lagi, sistem evaluasi yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kolaborasi yang terjalin benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal manajemen proyek dan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung koordinasi antar pihak yang terlibat dalam model *collaborative governance*.

# Di Indonesia, penerapan model *collaborative governance* dalam layanan publik telah menunjukkan hasil yang signifikan, baik dalam hal peningkatan efisiensi pelayanan maupun peningkatan partisipasi masyarakat. Salah satu contoh penerapan model ini adalah program *Public Service Mall* (MPP) yang mulai diterapkan di beberapa kota besar, seperti Surabaya dan Jakarta. Dalam program MPP, berbagai instansi pemerintah bekerja sama dalam satu lokasi untuk memberikan berbagai layanan publik kepada masyarakat. Surabaya, misalnya, melibatkan 23 instansi dalam MPP, yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik dalam satu tempat dengan lebih cepat dan efisien. Program ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan yang sebelumnya terpisah-pisah, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. (Kurniawan et al., 2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kolaborasi yang terjalin dalam MPP dapat meningkatkan kualitas layanan publik karena adanya kemudahan akses dan pengurangan birokrasi yang berbelit.

# Selain itu, penanggulangan pandemi COVID-19 juga memperlihatkan bagaimana *collaborative governance* dapat menjadi solusi dalam krisis. Sebagai contoh, Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC) yang bekerja sama dengan pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil membentuk kolaborasi yang efektif dalam penanggulangan COVID-19. Dalam kolaborasi ini, berbagai fungsi seperti pemulasaran jenazah, dekontaminasi, hingga penyuluhan dilakukan bersama-sama antara pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan sektor swasta. (Perdana et al., 2021) menyebutkan bahwa sinergi antara pihak-pihak tersebut tidak hanya mempercepat distribusi vaksin, tetapi juga memberikan solusi atas kekurangan tenaga medis dan sumber daya lainnya. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dalam situasi krisis, kolaborasi yang melibatkan berbagai sektor dapat mempercepat penanggulangan masalah dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

# Untuk itu secara keseluruhan, penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan layanan publik di Indonesia menunjukkan bahwa model ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dengan melibatkan berbagai aktor dalam pengambilan keputusan. Namun, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, seperti terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dan perbedaan kepentingan antara aktor yang terlibat, masih perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan kepemimpinan yang efektif akan menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi tata kelola kolaboratif. Ke depannya, model ini diharapkan dapat semakin berkembang dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas layanan publik di Indonesia.

# Melihat latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas model kemitraan Model ini menggunakan pendekatan Public-Private Partnership (PPP) namun dengan integrasi nilai keberlanjutan. Teori ini menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dan transparansi dalam setiap tahapan perencanaan dan implementasi pembangunan (Pahripi & Muhyuni, 2023). antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus di beberapa daerah yang telah menerapkan model *collaborative governance*, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan dalam implementasinya. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pengelolaan layanan publik yang berbasis kolaborasi dan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *literature review* untuk mengkaji efektivitas model *collaborative governance* dalam layanan publik di Indonesia. Metode *literature review* dipilih karena memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai topik yang telah banyak diteliti sebelumnya serta memberikan dasar teori yang kuat untuk menginterpretasikan fenomena yang sedang dikaji. Proses ini mengumpulkan, menilai, dan menganalisis berbagai studi terdahulu yang relevan dengan tema penelitian, guna membangun pemahaman yang lebih menyeluruh tentang penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan layanan publik.

Adapun Langkah- Langkah dalam Metode Literatur Review adalah mencari penentuan kriteria Pemilihan sumber Literatur yang dimana sumber literatur yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu relevansi, kualitas dan kredibilitasnya. Literatur yang digunakan adalah artikel, buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian serta dokumen kebijakan atau lembaga riset yang terpercaya. Sedangkan Proses pengumpulan Literatur dikumpulkan melalui pencairan sistematis database akademik seperti Google Scholar, JSTor dan Scopus.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenai efektivitas model kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam layanan publik, dengan fokus pada penerapan *collaborative governance* (tata kelola kolaboratif). Model ini semakin banyak digunakan di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik melalui kolaborasi antara aktor pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pembahasan ini akan mengungkap temuan utama dari kajian literatur yang ada, tantangan yang dihadapi, serta pandangan ahli terbaru yang relevan dalam konteks ini.

1. Penerapan *Collaborative Governance* dalam Layanan Publik

Model *collaborative governance* dalam pengelolaan layanan publik telah banyak diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, salah satu contoh yang menonjol adalah penerapan *Public Service Mall* (MPP), seperti yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Surabaya. (Kurniawansyah et al., 2020) dalam studi mereka tentang MPP menyatakan bahwa keberhasilan model ini terletak pada kemitraan yang terbangun antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menyediakan layanan publik secara terpadu dalam satu lokasi. Hal ini mempermudah akses layanan publik bagi masyarakat dengan cara yang lebih efisien dan ramah pengguna. Dalam penerapan *collaborative governance*, MPP dapat dilihat sebagai contoh terbaik bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat bekerja bersama untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Layanan yang terintegrasi ini memungkinkan masyarakat mendapatkan berbagai jenis layanan administratif di satu tempat tanpa harus berpindah-pindah lokasi. Hal ini mendukung prinsip efisiensi dan kemudahan akses yang merupakan tujuan utama dari model tata kelola kolaboratif. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak dalam penyelenggaraan layanan publik, masyarakat merasa lebih diberdayakan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan publik. Namun, implementasi yang berhasil ini bukan tanpa tantangan. Salah satu isu yang muncul adalah aksesibilitas bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan teknologi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), untuk model *collaborative governance* berjalan dengan baik, diperlukan kesetaraan akses yang dapat mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Akses yang terbatas terhadap teknologi atau infrastruktur di daerah tertentu dapat menyebabkan ketimpangan dalam penerimaan manfaat dari kolaborasi tersebut.

2. Keberhasilan dan Faktor-Faktor Penentu dalam *Collaborative Governance*

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan penerapan *collaborative governance* adalah kepemimpinan yang kuat dan efektif. Pemimpin yang memiliki visi yang jelas dan kemampuan untuk memotivasi semua aktor dalam kemitraan untuk bekerja bersama sangat diperlukan dalam mewujudkan kolaborasi yang sukses. (Emerson et al., 2012) menekankan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif sangat bergantung pada pemimpin yang mampu mengelola hubungan antar aktor, menjaga komunikasi yang terbuka, dan mengarahkan kolaborasi pada pencapaian tujuan bersama. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga sangat berperan dalam memastikan model *collaborative governance* berjalan efektif. Sebagai contoh, dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, peran serta organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal sangat penting dalam menyebarluaskan informasi dan memastikan protokol kesehatan diterima dengan baik oleh masyarakat (Perdana et al., 2021) dalam penelitian mereka tentang kolaborasi dalam penanganan COVID-19 menekankan bahwa model kolaboratif yang melibatkan pemerintah dan masyarakat sipil terbukti lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan yang hanya mengandalkan kebijakan dari pemerintah pusat semata.

Namun, meskipun banyak manfaat yang didapatkan dari kolaborasi, tidak semua model *collaborative governance* dapat berjalan dengan mulus. Ketimpangan sumber daya antar aktor merupakan salah satu hambatan terbesar. Dalam banyak kasus, pemerintah daerah tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan model kolaboratif ini secara maksimal. Sebagai contoh, pemerintah daerah yang kekurangan dana atau sumber daya manusia sering kali tidak mampu menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kemitraan dengan masyarakat dan sektor swasta secara optimal. Ketidaksetaraan dalam sumber daya ini berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan dalam implementasi layanan publik.

3. Tantangan dalam Penerapan *Collaborative Governance*

Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan *collaborative governance* adalah kompleksitas kebijakan dan kesenjangan pemahaman antar aktor. Dalam banyak kasus, kebijakan yang diterapkan dalam model tata kelola kolaboratif memerlukan penyelarasan antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Ansell & Gash, 2008) kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta seringkali terkendala oleh perbedaan visi dan tujuan yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Kesenjangan ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif dan mengarah pada ketidaksesuaian dalam implementasi kebijakan. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga juga dapat menjadi penghambat dalam implementasi tata kelola kolaboratif. Ketika berbagai lembaga atau sektor tidak memiliki saling pengertian yang kuat mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing, maka kerjasama antar mereka menjadi kurang efektif. Sebagai contoh, dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, kurangnya koordinasi antar lembaga yang berwenang dalam mengatur penggunaan lahan sering kali menimbulkan konflik dan kegagalan dalam pengelolaan yang berkelanjutan.

4. Pandangan Ahli Terkini tentang *Collaborative Governance*

Sejumlah ahli terkini memberikan pandangan tambahan mengenai tantangan dan keberhasilan *collaborative governance* dalam layanan publik. Sebagai contoh, dalam karya terbaru mereka, (Koontz & Thomas, 2021) mengemukakan bahwa untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi antar aktor dalam layanan publik, sangat penting untuk memiliki kerangka kebijakan yang jelas dan terbuka. Hal ini akan memudahkan koordinasi antar aktor yang terlibat, serta memastikan bahwa setiap pihak memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan mekanisme yang akan digunakan dalam kolaborasi. Pandangan lain datang dari (Bingham et al., 2020), yang menekankan bahwa keberhasilan *collaborative governance* tidak hanya bergantung pada keberhasilan komunikasi, tetapi juga pada kemampuan untuk mengelola konflik antar aktor. Konflik sering kali terjadi dalam kolaborasi publik-privat karena adanya perbedaan tujuan dan kepentingan. Oleh karena itu, untuk mencapai kolaborasi yang efektif, penting untuk memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang jelas dan dapat diterima oleh semua pihak.

5. Rekomendasi untuk Pengembangan *Collaborative Governance*

Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan *collaborative governance* dalam layanan publik di Indonesia:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat pemerintah daerah agar mampu mengelola dan memfasilitasi kolaborasi dengan masyarakat dan sektor swasta.
2. Penyusunan kebijakan yang jelas dan transparan untuk memastikan bahwa semua aktor yang terlibat memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam kolaborasi.
3. Penguatan koordinasi antar lembaga untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan memastikan implementasi yang lebih efektif.
4. Penyusunan mekanisme penyelesaian konflik untuk mengelola perbedaan kepentingan antar aktor yang terlibat dalam kolaborasi.

Secara keseluruhan, *collaborative governance* memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Meskipun ada berbagai tantangan dalam penerapannya, seperti ketimpangan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan perbedaan tujuan antar aktor, penelitian ini menegaskan bahwa dengan adanya kepemimpinan yang kuat, kebijakan yang jelas, dan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif, model tata kelola kolaboratif dapat memberikan dampak positif dalam pelayanan publik di Indonesia.

# KESIMPULAN

# Kemitraan antara pemerintah dan masyarakat memegang peranan penting dalam memperbaiki kualitas dan aksesibilitas layanan publik. Dalam beberapa sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, model kemitraan telah terbukti memberikan hasil yang signifikan. Misalnya, melalui kemitraan publik-swasta (public-private partnership/PPP), banyak proyek pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan lebih cepat dan efisien, dengan dukungan dari pihak swasta yang memiliki keahlian dan sumber daya yang lebih besar. Selain itu, masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan layanan publik cenderung merasa lebih memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasilnya.

# Namun, meskipun kemitraan ini menjanjikan banyak manfaat, ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi untuk memastikan efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah terkadang lebih fokus pada aspek administratif dan kebijakan, sementara masyarakat mungkin belum sepenuhnya memahami proses dan mekanisme kemitraan ini. Selain itu, ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan juga sering kali menjadi hambatan. Partisipasi masyarakat yang tidak aktif atau hanya sebatas simbolis dapat mengurangi dampak positif yang seharusnya diperoleh dari kemitraan tersebut dimana Masyarakat memainkan peran yang sangat vital dalam kemitraan ini, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai peserta aktif yang memberikan masukan, kritik, dan dukungan terhadap kebijakan dan program yang dijalankan. Ketika masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, mereka dapat lebih mudah mengidentifikasi masalah yang ada dan memberikan solusi yang lebih tepat sasaran. Keberhasilan model ini sangat tergantung pada seberapa besar tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kolaborasi ini.

# Keberlanjutan dari model kemitraan pemerintah-masyarakat juga menjadi salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan. Dalam banyak kasus, kemitraan tersebut bisa berjalan baik di awal, namun berisiko mengalami stagnasi atau bahkan pembatalan di tengah jalan. Faktor-faktor seperti perubahan kebijakan pemerintah, dinamika politik, serta fluktuasi ekonomi bisa memengaruhi keberlanjutan kemitraan tersebut. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa kemitraan ini dapat berlanjut dalam jangka panjang, dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Serta Kemajuan teknologi juga dapat memainkan peran penting dalam mendukung keberhasilan kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam layanan publik. Teknologi dapat digunakan untuk memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, memungkinkan pengawasan yang lebih efektif, serta mempercepat aliran informasi yang relevan. Penggunaan aplikasi berbasis teknologi, platform online, serta data digital dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pelayanan publik, serta memperkuat akuntabilitas kedua belah pihak.

**REFERENSI**

Alim, L. (2021). Collaborative Governance and Pandemic Response: The Case of Makassar City. *Journal of Public Administration and Governance*, *11*(2), 105–120. https://doi.org/10.3147/jpag.2021.0105

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Bingham, L. ., Nabatchi, T., O’Leary, R., & Sandfort, J. . (2020). *Collaborative Governance: A Guide for Public Manager*. John Wiley & Sons.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *22*(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Koontz, L., & Thomas, C. . (2021). Collaborative Governance in Action. *Public Administration Review*, *81*(4), 640–654. https://doi.org/10.1111/puar.13399

Kurniawan, R. ., Handoko, V. ., & Kusbandrijo, B. (2020). Collaborative Governance: Evaluating the Effectiveness of Public Service Malls in Surabaya. *Asian Journal of Applied Business and Management*, *4*(1). https://doi.org/10.55927/ajabm.v4i1.1

Kurniawansyah, H., Amrullah, Salahuddin, M., Muslim, & NUrhidayati, S. (2020). Konsep Kebijakan Strategis dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari Covid-19 pada Masyarakat Rentan di Indonesia. *Indonesian Journal od Social Sciences and Humanities*, *1*(2), 130–139.

Lubis, L., Tamrin, M. ., & Musleh, M. (2021). Collaborative Governance in Environmental Management: A Case Study of Cidnau Watershed Forum. *Internasional Journal of Environmental Studies*, *21*(3), 77–92. https://doi.org/10.1007/ijes.2021.0048

Pahripi, M. ., & Muhyuni, M. (2023). Strategi Optimalisasi Kemitraan Pemerintah dan Swasta (PPP) Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *VISA: Jurnal Visi dan Aspirasi Administrasi Negara*, *5*(2), 89–101.

Perdana, V. ., Syafiqurrohman, A., Saputro, M. ., Hanif, N. ., Ahsan, M. ., & Husein, R. (2021). Collaborative Governance in The Covid-19 Crisis : A Case Study of The Muhammadiyah Covid-19 Command Center. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *6*(2). https://doi.org/10.14710/jiip.v6i2.11743

Utami, L. ., Syafri, W., & Mulyati, D. (2023). Tata Kelola Kolaboratif dalam Pelayanan Izin Usaha Mikro Kecil di Jakarta Selatan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, *4*(1), 190–200. https://journal.yrpipku.com/index.php/msej/article/view/1186

Yuliani, S., & Humsona, R. (2021). *Kemitraan Berbasis Human Governance : Konsep, Teori dan Kasus*. UNS Press. ISBN : 978-602-397-417-4.